

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Peristiwa 11 September 2001 yang biasa disebut *Black September* menimpa negara super power Amerika Serikat telah menghancurkan gedung kembar *World Trade Center* (WTC) sebagai pusat perekonomian dunia di New York dan juga sebagian gedung pertahanan dan keamanan Pentagon di Washington, serta menewaskan ribuan rakyat Amerika. Peristiwa *Black September* itu telah mengubah tatanan politik internasional dan merupakan awal dari dilancarkannya perang terhadap terorisme dunia yang tertuju pada suatu organisasi yaitu Al-Qaida. Organisasi ini diyakini oleh Amerika dilindungi oleh pemerintahan Taliban di Afghanistan.

Perubahan tatanan politik internasional juga diikuti oleh perubahan orientasi kebijakan politik luar negeri di banyak negara, terutama Pakistan yang dikuasai oleh kelompok militer Pakistan Jenderal Pervez Musharraf kudeta dari pemerintahan yang sah hasil Pemilu tahun 1996 oleh Nawaz Sharif.

Perubahan orientasi politik luar negeri Pakistan pada masa Presiden Pervez Musharraf tertuju pada pemerintahan Taliban, yang semula mengakui secara *de jure* pemerintahan Taliban, setelah kelompok ini berhasil menguasai 90% wilayah Afghanistan di tahun 1996. Pengakuan ini dibuktikan dengan pembukaan kantor perwakilan diplomatik di masing-masing negara. Sejarah hubungan Pakistan-Afghanistan juga telah terbentuk pada saat penggulingan

pemerintahan komunis dukungan Uni Soviet. Begitu juga pada hubungan militer kedua negara sudah terjalin ketika Taliban berusaha menjadi penguasa pada tahun 1994 di Afghanistan melalui suplai sukarelawan dan pertukaran data intelijen.

Perubahan orientasi politik luar negeri Pakistan terhadap Afghanistan terutama rezim pemerintahan Taliban terlihat sangat signifikan ketika terjadinya peristiwa *Black September* di Washington. Amerika pada saat itu melancarkan serangan ke Afghanistan dengan tujuan memburu organisasi Al-Qaida dan ingin menjatuhkan pemerintahan Taliban. Pakistan dilihat secara geografis berbatasan langsung dengan Afghanistan dan Pakistan memiliki arti sangat penting bagi Amerika baik itu dilihat dari wilayah negara, kedekatan hubungan Pakistan-Taliban, bahkan kedekatan hubungan ISI (*Inter-Services Intelligence*)-Afghanistan untuk dukungan bagi suksesnya penggulingan penyerangan Amerika terhadap pemerintahan Taliban. Kepentingan Pakistan pada perubahan orientasi politik luar negeri terhadap Afghanistan dan dukungannya pada Amerika dianggap sangat berprospek dalam mendorong pemulihan ekonomi Pakistan, berada dalam komunitas yang mengharuskan serangan terhadap terorisme, disamping juga memperkuat legitimasi pemerintahan Jenderal Pervez Musharraf atas kudeta.

B. Latar Belakang Masalah

Pakistan merupakan salah satu negara Islam yang berada di kawasan Asia Selatan yang berbatasan langsung dengan Afghanistan. Pakistan menjadikan agama Islam sebagai agama negara yang merupakan simbol sebagai negara Islam. Sama halnya dengan Afghanistan ketika berada di bawah pemerintahan Taliban yang menerapkan hukum agama Islam sebagai hukum negara yang tertinggi.

Jika dilihat secara geografis, Pakistan berbatasan langsung dengan empat negara dan batasan terpanjang ialah India dan Afghanistan, sehingga posisi seperti ini berdampak langsung dalam negeri masing-masing negara ketika terjadi instabilitas keamanan, ekonomi maupun politik. Sebagai contoh, di saat pecah perang antar faksi di Afghanistan sebelum runtuhnya rezim Komunis, ribuan penduduk Afghanistan bersuku Pashtun meninggalkan negaranya menuju Pakistan.

Konflik panjang yang terjadi di Afghanistan, terutama sejak Revolusi Saur 27 April 1978 hingga rezim Komunis dikalahkan oleh pejuang Islam Afghanistan yaitu kelompok Mujahidin yang didukung oleh Amerika Serikat menyisakan banyak penderitaan bagi rakyat Afghanistan. Dalam catatan sejarah Afghanistan, selama masa pendudukan Uni Soviet merupakan masa yang paling memprihatinkan. Diperkirakan setidaknya lebih kurang satu juta jiwa warga Afghanistan tewas dan perekonomian lumpuh total.¹

Kuantitas pengungsi yang tidak sedikit ini akan mempengaruhi keseimbangan demografis dan ekonomi. Pakistan harus menyediakan kamp-kamp

¹ John Ford Shroder Jr., B.S., Ph.D, *Afghanistan*, Encarta: Reference Library 2009, 1993-2008 Microsoft Corporation.

pengungsian ditambah dengan bantuan logistik. Berarti bahwa Pakistan akan terbebani oleh anggaran pengungsi di tengah ekonominya masih dalam krisis.

Arti penting geopolitik bagi hubungan kedua negara sama halnya arti ekonomi, sosial dan politik. Dari sisi ekonomi, perekonomian Afghanistan serta impor persenjataan untuk pasukan Taliban dilakukan melalui pelabuhan laut Pakistan karena memang Afghanistan tidak memiliki laut dan pelabuhan laut. Devisa masuk ke Pakistan dalam bentuk pajak dan bea masuk perdagangan internasional, memajukan dan menghidupkan perekonomian baik bagi Pakistan sendiri maupun Afghanistan.

Selain kedekatan ekonomi, Pakistan dan Afghanistan juga memiliki kedekatan sosial, politik dan agama. Penduduk kedua negara memiliki keragaman etnik dimana sebagian besar memiliki persamaan-persamaan kultur. Pakistan merupakan negara yang memiliki beragam bahasa dan beragam etnik diantaranya: Punjabi (58%), Sindh (13%), Pashtun (13%), Muhajir (8%) dan Balukistan (4%).² Sedangkan suku Pashtun yang ada di Afghanistan merupakan suku mayoritas diantara suku Uzbek, Tajik dan Hazara.

Persamaan etnik menjadi salah satu kedekatan dan sumber dukungan Pakistan terhadap pemerintahan Taliban di Afghanistan. Kedua negara ini memiliki keterkaitan sejarah politik yang panjang. Berawal dari pemerintahan Komunis pro-Soviet berkuasa tahun 1989. Pakistan berusaha membantu Afghanistan untuk keluar dari kemelut krisis internal akibat pemerintahan Komunis. Oposisi anti Komunis yaitu Mujahidin yang melawan pemerintahan

² Saeed Shafqat, M.A, Ph.D, *Pakistan*, Encarta: Reference Library 2009, 1993-2008 Microsoft Corporation.

Komunis didukung oleh Pakistan dengan berbagai cara, termasuk bantuan militer, senjata dan milisi sukarelawan yang dari Pakistan. Pakistan dengan bantuan Amerika dan Cina mem-*backup* Mujahidin selama satu dasawarsa lebih.³ Perjalanan panjang itu akhirnya berhasil dilakukan Amerika dengan bantuan Pakistan yang secara geografis berdekatan dan berbatasan dengan Afghanistan. Pemerintahan Komunis takluk dan Uni Soviet mundur, menyatakan kekalahannya karena tidak dapat membantu mempertahankan rezim berkuasa dukungannya.

Setelah Uni Soviet keluar dari Afghanistan tahun 1989, muncul konflik baru antar kelompok yang dulunya tergabung dalam kelompok anti Komunis. Karena mereka sama-sama punya andil dalam pembebasan negaranya dari Komunisme, mereka terpecah-pecah ke dalam beberapa kelompok yang saling berebut kekuasaan untuk duduk di pemerintahan baru.⁴

Melihat instabilitas yang terjadi di negara tetangganya, Pakistan tergerak untuk terlibat kembali dalam proses perdamaian internal di Afghanistan. Karena bagaimana pun instabilitas tersebut akan berdampak pada politik dalam negerinya sendiri. Usaha untuk terciptanya stabilitas ditempuh dengan jalan membantu salah satu faksi untuk menduduki kekuasaan. Pilihan jatuh pada Taliban yang terdiri dari mahasiswa yang relatif tidak memiliki kesan buruk di masyarakat Afghanistan waktu itu. ISI (*Inter-Services Intelligence*) Pakistan

³ G.W. Choudury, *The Last Days of United Pakistan*, Indiana University Press, 1974, hal 210.

⁴ John L. Esposito, *Islamic Fundamentalism*, Encarta: Reference Library 2009, 1993-2008 Microsoft Corporation.

melibatkan diri membantu Taliban dalam penyediaan data intelijen, logistik, dan sukarelawan perang.⁵

Kemunculan Taliban ini bermula dari adanya para mahasiswa yang belajar agama (*group of madrasa students*) di Pakistan sejak Uni Soviet menginvasi Afghanistan tahun 1979.⁶ Milisi mahasiswa ini dan dibantu sebagian bekas veteran perang anti Komunis yang juga belajar agama di Pakistan⁷ dapat menguasai hampir seluruh wilayah Afghanistan dalam waktu yang singkat. Tepatnya pada tanggal 27 September 1996, Taliban berhasil menaklukkan ibukota negara Kabul, sekaligus menandakan awal dari kekuasaan rezim Taliban di Afghanistan.

Dalam konteks sub-kawasan Asia Selatan dan strategis, Pakistan membutuhkan dukungan Afghanistan dan sekutu lain yaitu Cina untuk mendukung peran yang diinginkannya sebagai kompetitor regional (*regional competitor*) melawan India yang didukung oleh negara mayoritas pemeluk Hindu, seperti Nepal dan Bhutan.⁸ Selain itu, Pakistan juga membutuhkan dukungan Afghanistan dalam konflik Kashmir, sebuah konflik klaim wilayah antara Pakistan dan India.⁹

⁵ Aabha Dixit, *Soldier of Islam: Origins, Ideology and Strategy of the Taliban*, Research Associate, IDSA, posted on: <http://www.idsa-india.org/an-aug2.html>.

⁶ "The Taliban Story: God's Holy Warriors or the Devil's Militia?", <http://www.afghan-web.com>

⁷ John, op.cit.

⁸ Zalmay Khalilzad and Ian O. Lesser, *Source of Conflict in the 21st Century: Regional Future and US Strategy*, Rand, Project AIR FORCE, Washington, 1998, hal 148-154.

⁹ John, op.cit.

Starting point terjadinya perubahan orientasi politik luar negeri Pakistan terhadap Taliban yang dilakukan pada masa pemerintahan militer Pervez Musharraf, ketika terjadi aksi bunuh diri yang menghancurkan gedung kembar WTC di New York dan markas Pertahanan dan Keamanan Pentagon di Arlington, Virginia. Pemerintah Amerika menuduh aksi bunuh diri ini bagian dari jaringan terorisme internasional yang didalangi oleh kelompok Al-Qaida yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Basis terbesar markas Al-Qaida pimpinan Osama bin Laden ini terdapat di Afghansitan dan dilindungi oleh rezim Taliban.

Pervez Musharraf mengambil langkah cukup berani dalam kebijakan luar negerinya yaitu memutuskan hubungan yang sudah terjalin baik dengan Taliban dan bergabung dengan koalisi Amerika dalam penggulingan rezim Taliban. Walaupun kebijakan tersebut mendapat pertentangan dari sebagian masyarakat Pakistan sendiri.

C. Permasalahan

Berdasarkan paparan singkat tentang hubungan Pakistan dan Afghanistan pada masa rezim Taliban di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

- Mengapa terjadi perubahan kebijakan luar negeri Pakistan pada masa Pervez Musharraf terhadap pemerintahan Taliban di Afghanistan yang menyebabkan jatuhnya rezim Taliban?

D. Kerangka Teoritik

Terjadinya perubahan orientasi politik luar negeri Pakistan pada pemerintahan Pervez Musharraf terhadap pemerintahan Taliban di Afghanistan, memiliki alasan-alasan tertentu terutama adanya tekanan luar Pakistan sendiri. Penjelasan mengenai politik luar negeri Pakistan terhadap pemerintahan Taliban benar-benar tidak lengkap apabila tanpa menganalisa keadaan di dalam negeri (kepentingan nasional) yang menimbulkan perubahan tindakan politik luar negeri Pakistan.

Faktor-faktor penyebab dan tujuan yang akan dicapai Pakistan dengan merubah politik luar negerinya terhadap pemerintah Taliban akan dapat dijelaskan dengan menggunakan teori-teori politik luar negeri dan sifat politik luar negeri di bawah ini.

1. Politik Luar Negeri

a. Definisi

Hubungan internasional, politik internasional dan politik luar negeri merupakan satuan analisa yang saling terkait dan sulit dikenali batasannya.¹⁰ Studi politik luar negeri dan studi hubungan internasional merupakan sinonim.¹¹ Sangat sukar untuk memberi pengertian yang sebaik-baiknya kepada politik luar negeri. Dalam pengertian yang luas, politik luar negeri adalah pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara sewaktu memperjuangkan kepentingannya, dalam

¹⁰ Tulus Warsito, M.Si, *Teori-teori Politik Luar Negeri: Relefans dan Keterbatasannya*, BIGRAF Publishing, Yogyakarta, 1998, hal 23-24.

¹¹ J.E. Dougherty & R.L. Pfaltzgraf Jr., *Beberapa Teori Hubungan Internasional*, (terj), M. Amien Rais, Yogyakarta, FISIPOL UGM, 1983, hal 25.

hubungannya dengan negara lain.¹² Politik luar negeri mencakup semua tindakan suatu negara, yang mempengaruhi sikapnya terhadap negara lain, kelompok maupun perhimpunan dan pakta negara-negara lain.¹³ Gibson dalam bukunya, *The Road to Foreign Policy*, mendefinisikannya sebagai rencana komprehensif yang dibuat dengan baik, didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman, untuk menjalankan bisnis pemerintahan dengan negara lain.¹⁴ Menurut James M. McCormick, *foreign policy, a course of action or set of principles adopted by a nation's government to define its relations with other countries or groups of countries*.¹⁵

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, *foreign policy* adalah strategi atau rangkaian kegiatan tindakan yang terencana, yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan dari suatu negara terhadap negara lain atau entitas internasional, ditujukan untuk meraih tujuan spesifik yang terdefinisi intern bagi kepentingan nasional.

*Foreign Policy is strategy or planned course of action developed by the decision makers of a state vis a vis other state or international entities aimed at achieving specific goals defined intern of national interest.*¹⁶

¹² Carlton Clymer Rodee, *Pengantar Ilmu Politik*, Terj Zulkifly Hamid, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 613.

¹³ B.N. Marbun, SH, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal. 446.

¹⁴ Dikutip dari Gibson, *The Road to Foreign Policy*, dalam buku S.L. Roy, *Diplomasi*, Terj. oleh Herwanto dan Mirsawati, CV. Rajawali, Jakarta, 1991, hal. 31.

¹⁵ James M. McCormick, *Foreign Policy*, Encarta: Reference Library 2009, 1993-2008, Microsoft Corporation.

¹⁶ Dikutip dari Jack C. Plano dan Roy Olton, dalam Drs. Djumadi M. Anwar, M.Si., *Diktat Politik Luar Negeri Indonesia*, Hubungan Internasional FISIPOL UMY, 2005.

Politik luar negeri dalam aspeknya yang dinamis adalah sebuah sistem tindakan suatu pemerintahan terhadap pemerintahan lain atau suatu negara terhadap negara lain.¹⁷ Politik luar negeri dapat dipengaruhi oleh banyak variabel, termasuk sejarah aliansinya dengan negara-negara lain, budayanya, bentuk pemerintahannya, ukuran, lokasi geografisnya, hubungan ekonomi dan kekuatan militernya.¹⁸

Analisa tentang hubungan Pakistan-Afghanistan merupakan analisa hubungan internasional, politik internasional dan politik luar negeri. Analisa mengenai perubahan kebijakan orientasi politik luar negeri Pakistan terhadap Taliban ialah kepentingan pemerintahan Pervez Musharraf dalam upaya mendapatkan legitimasi kekuasaan hasil kudeta dari masyarakat internasional dan mencari bantuan dana dari IMF atas dasar dorongan Amerika sebagai konsekuensi dari penyediaan bantuan militer Pakistan dalam penggulingan rezim Taliban dan rencana penangkapan Osama bin Laden serta tekanan Amerika Serikat dan didukung oleh masyarakat internasional terhadap Pakistan dalam memburu terorisme merupakan kasus yang akan dibahas.

Dalam hubungan dengan negara lain, sebuah negara memiliki kebijakan politik luar negeri yang meliputi semua kebijakan yang diambil oleh negara dengan negara lain. Kebijakan luar negeri adalah kebijakan suatu negara dalam bertindak, bereaksi dan berinteraksi dengan negara-

¹⁷ Roy, op.cit.

¹⁸ McCormick, op.cit.

negara lain atau terhadap lingkungan regional/internasional.¹⁹ Output kebijakan luar negeri biasanya merupakan tindakan atau gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu tindakan dalam lingkungan. Tujuan dan tindakan negara lain menentukan agenda masalah politik luar negeri antara dua pemerintahan atau lebih. *Tipe* tanggapan (mendamaikan, mengancam, dan sebagainya) biasanya akan serupa dengan stimulus; artinya kebanyakan tindakan politik luar negeri cenderung bersifat timbal balik.²⁰

Pada dasarnya politik luar negeri mengandung tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Cecil V. Crabb, mengatakan bahwa politik luar negeri merupakan sintesa dari tujuan (kepentingan nasional) dan kemampuan dari suatu negara. Jadi, di dalam politik luar negeri terdapat dua elemen yaitu: tujuan (*national objectives*) yang hendak dicapai serta saran-saran (*means*) untuk mencapainya.

*Reduced to its most fundamental ingredients, foreign policy consists of two elements: national objectives to be achieved and means for achieving them. The interaction between national goals and the resources for attaining is the perennial subject of statecraft. In its ingredients the foreign policy of all nations, great and small, is the same.*²¹

¹⁹ Ali Muhammad, M.A., *Kebijakan Luar Negeri Australia*, diktat perkuliahan Politik dan Pemerintahan Australia, Hubungan Internasional FISIPOL UMY, 2005, hal. 1.

²⁰ K.J. Holsti, *Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis*, Terj Jilid 2, Erlangga, Jakarta, 1998, hal 118.

²¹ Dikutip dari Cecil V. Crabb, Jr, dalam buku T.A. Couloumbis and James H. Wolfe, *Introduction to International Relations: Power and Justice*, Prentice-Hall, Inc, Englewood, 1978, hal 89.

Dalam menganalisa terjadinya perubahan kebijakan politik luar negeri Pakistan terhadap pemerintahan Taliban, didasarkan pada pertimbangan internal (kepentingan nasional) dan kondisi eksternal (tekanan internasional).

b. Tujuan dan Faktor Pendukung Politik Luar Negeri

Secara garis besar setiap politik luar negeri bertujuan mencapai kepentingan nasional, namun sebuah kepentingan nasional adalah konsep abstrak yang harus dikonkretkan. Kebijakan luar negeri suatu negara biasanya bertujuan memelihara dan mempromosikan kepentingan ekonomi politiknya di luar negeri dan posisinya di masyarakat internasional.²² Ada lima tujuan politik luar negeri menurut Totton J. Anderson.²³

1) Mempertahankan Integritas Negara

Integritas di sini adalah keberadaan negara mencakup wilayah geografis yang dimiliki negara dan penduduk negara itu, baik yang berada dalam kesatuan wilayah maupun di negara lain.

2) Meningkatkan Kepentingan Ekonomi

Prinsip kedua yang mendasari pemilihan tujuan ialah kewajiban pemerintah untuk meningkatkan hidup warga negaranya. Kesejahteraan bersifat menyeluruh untuk seluruh warga negara dan bukan kesejahteraan individu. Unit analisis yang mengukur kemakmuran negara dengan pemakaian konsep ekonomi makro, pendapatan nasional dan tingkat pertumbuhannya.

²² McCormick, op.cit.

²³ Rodee, op.cit.

3) Menjamin Keamanan Nasional

Prinsip ini berasumsi bahwa kebijaksanaan luar negeri harus direncanakan untuk melindungi dari serangan menyiratkan adanya bahaya. Keberlangsungan hidup suatu bangsa diupayakan melalui jalan menjaga keamanan. Dimana masing-masing negara dalam sistem internasional tertentu, dunia dipenuhi dengan permusuhan, maka jalan yang ditempuh adalah meminimalisasi bahaya dan dampak konflik terhadap keamanan negara.

4) Melindungi Martabat Nasional

Prinsip keempat ini dapat dianalogikan sebagai individu di tengah-tengah komunitas masyarakat tempat ia hidup. Individu ini akan selalu memikirkan reputasi pribadinya pada setiap tindakan yang dilakukan dengan berinteraksi dengan individu dalam komunitasnya. Demikian juga sebuah negara, biasanya bertindak untuk memperoleh perhatian negara lain, supaya dihormati dan memperoleh konsesi status. *Prestige* oleh Harold Nicholson diartikan sebagai atribut kedaulatan. Oleh karena itu suatu negara bertindak di arena politik internasional agar kebanggaan dan martabatnya dapat dipelihara.

5) Membangun Kekuasaan

Kekuasaan politik adalah kemampuan di dalam tiap hubungan manusia untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Dalam dunia internasional, sebuah negara yang kecil (*periphery*) akan

dikuasai oleh negara yang besar (*center*), dan begitu juga untuk memaksimalkan *power* oleh negara dapat ditempuh dengan kepemilikan teknologi persenjataan mutakhir dan canggih.

Lima prinsip dasar ini menjadi landasan untuk mencapai tujuan politik luar negeri suatu bangsa. Setelah menetapkan prinsip-prinsip tujuan politik luar negeri, tidaklah cukup untuk menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara akan tetapi ada beberapa fakta menunjukkan adanya pengaruh status negara dalam arena politik internasional. Sebuah tindakan yang dipilih suatu negara untuk mencapai tujuan akan dipengaruhi oleh kemampuan yang dimilikinya. Dengan kata lain, tujuan diterapkannya sebuah kebijakan akan dapat dicapai hanya jika negara itu memiliki kapabilitas.

Definisi kapabilitas adalah kemampuan negara untuk mengadakan perubahan dalam lingkup internasional bagi kepentingan dirinya. Negara melakukan usaha-usaha efektif dalam dunia nyata dengan kapabilitasnya, sarana yang dipilih dan taktik yang dipakai untuk mencapai tujuan hanyalah merupakan fungsi kapabilitas negara secara keseluruhan untuk bertindak dalam situasi yang dihadapinya. Kapabilitas ini kemudian sebagai penentu dalam keberhasilan politik luar negeri atau dalam merubah kebijakan politik luar negeri.²⁴

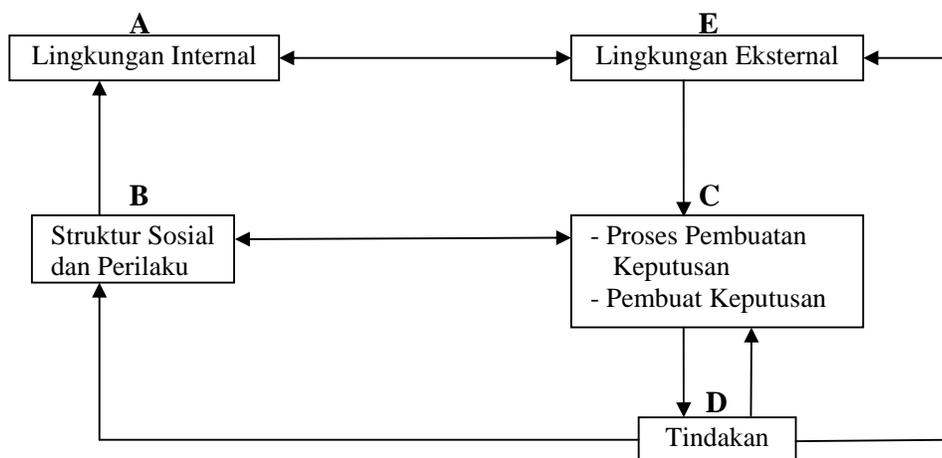
²⁴ Dahlan Nasution, *Politik Internasional: Konsep dan Teori*, Penerbit Erlangga, 1989, hal 25-27.

Telah dikemukakan tujuan politik luar negeri dan kapabilitas sebagai faktor pendukung. Kedua hal ini masuk dalam tahap awal dari sebuah penentuan atau penerapan kebijakan, sedangkan tahap berikutnya dalam sebuah politik luar negeri yaitu pembuatan keputusan. Dalam pembuatan keputusan, para pembuat kebijakan yang terdiri dari kepala pemerintahan bersama perangkatnya, mempunyai peran vital yang akan dipengaruhi beberapa aspek, mulai dari konteks dalam negeri hingga konteks internasional.

2. Pengambilan Keputusan

Telaah politik luar negeri dari sudut pandang pembuatan keputusan berarti menempatkan suatu keputusan politik luar negeri tertentu atau serangkaian keputusan politik luar negeri sebagai sasaran analisis. Pendekatan yang dipakai dalam analisis pengambilan keputusan politik luar negeri Pakistan masa Pervez Musharraf ialah skema analitik yang telah dirumuskan oleh Richard Snyder.²⁵

²⁵ Prof. DR. Mohtar Mas' oed, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisi*, PAU-UGM 1989, hal. 138-142.



Skema 1. Model Snyder tentang Proses Pembuatan Keputusan

Sebuah negara, diibaratkan oleh Snyder sebagai sosok perilaku individu. Lalu dianjurkan untuk mempelajari perilaku para pemegang kekuasaan suatu negara karena mereka dipandang sebagai pembuat keputusan sebenarnya dan berbicara, bertindak atas nama negara, sehingga keputusan mereka dianggap penting dan otoritatif. Satu hal yang terpenting dalam pengambilan keputusan politik luar negeri ialah persepsi pembuat keputusan karena persepsi inilah yang membentuk pandangan para pembuat keputusan tentang kenyataan dan yang kemudian mendorong tindakan mereka. Dengan kata lain menganalisa keputusan, bukan mengevaluasi keputusan.

Analisa politik luar negeri Pakistan ini mencoba untuk membangun analisis atas dasar pandangan para pembuat keputusan untuk tujuan kepentingan nasionalnya yaitu kondisi internal Pakistan dan kondisi lingkungan internasional yang sedang terjadi terutama masalah persepsi terorisme internasional. Hal tersebut telah memaksa para pembuat keputusan untuk melakukan perubahan kebijakan.

Dalam konteks kebijakan politik luar negeri Pakistan dalam merubah kebijakan, dari yang semula mendukung dan mengakui pemerintahan Taliban hingga bergabungnya Pakistan dalam koalisi Amerika yang ingin menjatuhkan pemerintahan Taliban, dilakukan atas nama negara dan kepentingan nasional Pakistan.

Pakistan merupakan pemerintahan junta militer pada saat terjadinya penggulingan Taliban oleh Amerika pada tahun 2001. Pemerintah Amerika menganggap pemerintahan Taliban melindungi kelompok teroris internasional. Selanjutnya Amerika Serikat menjadikan Pakistan sebagai pangkalan militer untuk memburu para teroris dengan cara menekan pemerintah Pakistan agar mau berkoalisi.

E. Hipotesa

Ada empat faktor penyebab terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Pakistan terhadap pemerintahan Taliban di Afghanistan yang semula Pakistan merupakan salah satu dari tiga negara tetangga yang mendukung legitimasi rezim Taliban, kemudian setelah terjadinya peledakan di gedung WTC dan Pentagon

yang diduga oleh Amerika Serikat pelakunya adalah jaringan Al-Qaida pimpinan Osama bin Laden bermarkas di Afghanistan di bawah rezim Taliban, berbalik menjadi ikut dalam membantu Amerika dalam penyerangan terhadap kelompok Al-Qaida dan menjatuhkan rezim Taliban.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Pakistan terhadap pemerintahan Taliban yaitu:

1. Ingin mendapatkan insentif ekonomi dari Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya serta lembaga keuangan internasional.
2. Mengharapkan imbalan dari Amerika Serikat berupa bantuan militer karena Pakistan membutuhkan peralatan militer untuk mengimbangi kekuatan militernya dengan India.
3. Adanya tekanan dari Amerika Serikat yang didukung oleh masyarakat internasional terutama NATO dalam pemberantasan terorisme.
4. Mendapatkan legitimasi pemerintahan hasil kudeta di mata internasional.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan penelitian dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber dan studi pustaka seperti: buku-buku, jurnal, surat kabar dan artikel-artikel dari majalah dan internet serta Microsoft Encarta yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab, dari masing-masing bab akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka teoritik, hipotesa, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II membahas tentang posisi Afghanistan bagi Pakistan yang didalamnya terdapat gambaran umum Negara Pakistan dan Afghanistan, kedekatan hubungan budaya dan etnik Pakistan-Afghanistan serta arti penting Afghanistan bagi Pakistan.
- Bab III menjelaskan tentang dinamika politik luar negeri Pakistan terhadap rezim pemerintahan Taliban di Afghanistan yang mencakup prinsip dan tujuan politik luar negeri Pakistan, hubungan Pakistan dengan rezim Taliban dan kebijakan luar negeri Pakistan terhadap Afghanistan.
- Bab IV menjelaskan pengambilan keputusan luar negeri Pervez Musharraf yang berisikan pemegang kekuasaan sebagai aktor pembuat keputusan, lingkungan internal Pakistan yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Pakistan dan lingkungan internasional sebagai faktor eksternal yang melatarbelakangi perubahan kebijakan luar negeri Pakistan.
- Bab V berupa kesimpulan dari pembahasan skripsi ini.